



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS 1A KHUSUS
TRIWULAN IV**

TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan. Jenderal. S. Parman Kav. Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat
Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108, Email : delegasi.pnjakbar@gmail.com
Website : www.pn-jakaratbarat.go.id, Email : pengadilanjakaratbarat@gmail.com

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK)**

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.

Disahkan di Jakarta

Desember 2021

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

SOHE, S.H.,M.H.

NIP.: 19660128 199212 1 001

Ketua Tim Zona Integritas

SETYANTO HERMAWAN, S.H.,M.Hum.

NIP.: 19640410 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode Juli-September Tahun 2021 pada Pengguna Layanan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Aplikasi *si SUPER* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna pengadilan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan oleh para Pengguna Layanan Pengadilan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diambil dengan cara menyebarkan kuesioner ke para Pengguna Layanan Pengadilan.

Pelaksanaan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik lagi dalam masa pandemi Covid-19 ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2021.

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
E. Tahapan Pelaksanaan.....	2
BAB II.....	4
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel.....	4
C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	5
BAB III.....	7
PROFIL RESPONDEN.....	7
BAB IV.....	9
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	9
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	9
BAB IV.....	12
PENUTUP.....	12
1. Kesimpulan.....	12
2. Rekomendasi.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Tabel 2	6
Tabel 3	7
Tabel 4	7
Tabel 5	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada tahun 2021 ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu Triwula I (Periode Januari s/d Maret), Triwulan II (Periode April s/d Juni), Teriwulan III (Periode Juli s/d September) dan Triwulan IV (Periode Oktober s/d Desember). Pada Laporan ini, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan pada bulan November sampai Desember Tahun 2021.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara lain:

1. Tim survei menggunakan Aplikasi siSUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan data Survei Kepuasan Masyarakat, berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.;

2. Tim Survei membuka hasil perhitungan Indeks Survei melalui Aplikasi siSUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengarahkan kepada semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengisi Aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi/siSUPER, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi. Kuesioner/Angket tersebut terdiri dari 10 indikator ruang lingkup dalam hal ini yaitu Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang, dan Transaksi Rahasia yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan, Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan, Perilaku Petugas dalam Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Tabel 1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2

Bobot Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Mutu Pelayanan	Skala Penilaian	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	Sangat Baik	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2.	Baik	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25
3.	Kurang Baik	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4.	Tidak Baik	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

BAB III
PROFIL RESPONDEN

1. Tingkat pendidikan responden

Tabel 3

Tingkat pendidikan responden

No.	Klarifikasi	Frekuensi
1.	SD	0
2.	SLTP	0
3.	SLTA	6
4.	DIPLOMA 1	0
5.	DIPLOMA 2	0
6.	DIPLOMA 3	1
7.	S1	37
8.	S2	6
9.	S3	1

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana (S1).

2. Pekerjaan responden

Tabel 4

Jenis pekerjaan responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi
1.	PNS	0
2.	TNI	0
3.	POLRI	0
4.	SWASTA	28
5.	WIRUSAHA	5
6.	TENAGA KONTRAK	0

7.	LAINNYA	18
----	---------	----

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki pekerjaan Swasta.

3. Kelompok usia responden

Tabel 5
Usia responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	%
1.	18 - 28 tahun	12	23,53
2.	29 - 39 tahun	20	39,22
3.	40 - 49 tahun	11	21,57
4.	50 - 59 tahun	8	15,69
5.	60 – 69 tahun	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas Responden pengguna layanan pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 - 39 tahun.

BAB IV
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dan analisis data yang telah dilakukan melalui Aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum si SUPER telah diketahui bahwa hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **3,81/95,25%** berada pada kategori mutu pelayanan “**A (Sangat Baik)**” (pada interval 81,26-100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus yang hendak kita capai sebesar **87%** ternyata hasil tersebut mencapai sasaran yang kita hendak capai.

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) unsur pertanyaan. Selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 10 Unsur Pertanyaan sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan

Dari unsur manipulasi peraturan yang dinilai Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur Manipulasi Peraturan telah diperoleh nilai sebesar 195;

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Dari unsur penyalahgunaan jabatan yang dinilai Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur penyalahgunaan jabatan telah diperoleh nilai sebesar 195;

3. Unsur Menjual Pengaruh

Dari unsur menjual pengaruh yang dinilai Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur menjual pengaruh telah diperoleh nilai sebesar 191;

4. Unsur Transaksi Biaya

Dari unsur transaksi biaya yang dinilai Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transaksi biaya telah diperoleh nilai sebesar 195;

5. Unsur Biaya Tambahan

Dari unsur biaya tambahan yang dinilai Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur biaya tambahan telah diperoleh nilai sebesar 195;

6. Unsur Hadiah

Dari unsur hadiah yang dinilai Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta). Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur hadiah telah diperoleh nilai sebesar 195;

7. Unsur Transparasi Biaya

Dari unsur transparasi biaya yang dinilai Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transparasi biaya telah diperoleh nilai sebesar 193;

8. Unsur Percaloan

Dari unsur percaloan yang dinilai Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur percaloan telah diperoleh nilai sebesar 194;

9. Perbuatan Curang

Dari unsur perbuatan curang yang dinilai Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur perbuatan curang telah diperoleh nilai sebesar 195;

10. Transaksi Rahasia

Dari unsur transaksi rahasia yang dinilai Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transaksi rahasia telah diperoleh nilai sebesar 195;

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut telah diperoleh 3 (tiga) Nilai Unsur Tertinggi dan 3 (tiga) Nilai Unsur Terendah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Unsur Tertinggi

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi telah diperoleh 3 (tiga) nilai tertinggi, sebagai berikut:

- a) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, diperoleh nilai 195
- b) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, diperoleh nilai 195
- c) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, diperoleh nilai 195

2. Nilai Unsur Terendah

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi telah diperoleh 3 (tiga) nilai terendah, sebagai berikut:

- a) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara, diperoleh nilai 191
- b) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan, diperoleh nilai 193
- c) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan, diperoleh nilai 194

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan kepada para Pencari Keadilan melalui Aplikasi si SUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diperoleh dari 51 orang Responden, adapun capaian yang diharapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1 A Khusus sebesar 87 % dan dari hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat telah diperoleh Nilai Indeks sebesar 3,81/95,25% berada pada kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” pada interval 81,26-100,00.

2. Rekomendasi

Kepada jajaran Manajemen dan seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hendaknya untuk lebih meningkatkan lagi dalam mutu pelayanan di setiap Pelayanan yang diberikan kepada para Pencari Keadilan, khususnya terhadap 3 (tiga) nilai Unsur Terendah yaitu Unsur menjual pengaruh, Unsur transparansi biaya dan Unsur percaloan, supaya para Pencari Keadilan merasa puas disetiap pelayanan yang diberikan;

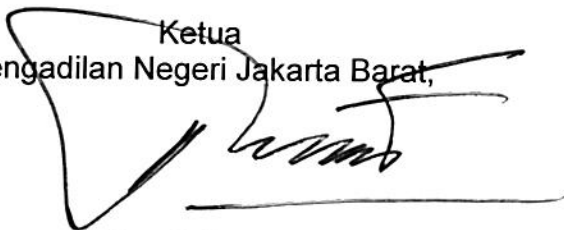
**Hasil Tindak Lanjut 3 (Tiga) Nilai Terendah
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Periode November - Desember 2021
Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Dari hasil analisis Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) telah diperoleh 3 (tiga) nilai terendah yaitu:

- a) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara, diperoleh nilai 191
- b) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan, diperoleh nilai 193
- c) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan, diperoleh nilai 194

No.	Unsur	Tindak Lanjut
1.	Menjual Pengaruh	Pimpinan dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah melaksanakan penandatanganan pakta integritas yang memuat perihal penolakan gratifikasi langsung maupun tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaannya, serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
2.	Transparansi Biaya	Seluruh petugas pelayanan pada PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diingatkan agar pada saat melakukan transaksi keuangan /pembayaran dengan menggunakan bukti pembayaran yang sah.
3.	Percaloan	Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan identifikasi area-area yang berpotensi terjadinya praktik percaloan, dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktik tersebut seperti menindak dengan tegas pegawai yang terlibat percaloan dan menyediakan layanan pengaduan yang mudah di akses oleh masyarakat;

Demikianlah Hasil Tindak Lanjut 3 (tiga) nilai terendah Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini dibuat, diucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Sohe, S.H., M.H.

Jakarta, 3 Januari 2022.
Panitera,

Hamir Achmadi, S.H., M.H.



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,81 / 95,25%

Jumlah	51 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 34	
	PEREMPUAN : 17	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 1
	SMU : 6	S1 : 37
	Diploma 1 : 0	S2 : 6
		S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 0	
	TNI : 0	SWASTA : 28
	POLRI : 0	WIRUSAHA : 5
	LAINNYA : 18	TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,745
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 3,784
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,804

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 10 Januari 2022
Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

PRIM HARYADI

Daerah Demisili

	Jumlah (Orang)
1 DKI JAKARTA	49
2 JAWA BARAT	2

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	12	23.53
29 - 39 Th	20	39.22
40 - 49 Th	11	21.57
50 - 59 Th	8	15.69
60 - 69 Th	0	0.00
Total	51	

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	3
2 Layanan Perdata	15
3 Layanan Hukum / Informasi	31
4 Layanan Administrasi Umum	2

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	195	195	191	195	195	195	193	194	195	195	
NRR Per RL	3.824	3.824	3.745	3.824	3.824	3.824	3.784	3.804	3.824	3.824	38.098
NRR Terimbang	0.382	0.382	0.375	0.382	0.382	0.382	0.378	0.380	0.382	0.382	3.810
IPAK Uji Pelayanan											3.81

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi
------------------	-------------------

No.	Unsur	Nilai
1	Pemakaian dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	191
2	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	193
3	Apakah pernah mengetahui ada praktik percobaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	194